



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAHMA SARI FATMA**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT**
3. NHK : **161597**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.760.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/130 m2 di KAB / KOTA ---,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA ---,
HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , Rp.
90.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **377.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
3. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **65.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **1.000.000.000**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.333.493.030
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.535.493.030
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.535.493.030

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.